



**Siaran Pers**  
**20 November 2018**

**Timor-Leste memperingati Hari Internasional untuk Konvensi Hak Anak:  
“Membangun dunia yang aman dari ancaman sehingga semua anak di sekolah  
dapat mengembangkan potensi mereka”**

20 November diperingati sebagai Hari Anak Internasional yang juga merayakan Konvensi tentang Hak Anak dan semua Negara Pihak termasuk Timor-Leste, yang telah meratifikasi Konvensi ini pada tahun 2003, turut merayakannya juga. Tema sentral untuk memperingati tahun 2018 adalah "*Membangun dunia yang aman dari ancaman sehingga semua anak di sekolah dapat mengembangkan potensi mereka.*"

Melalui komitmennya untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak, Negara Timor-Leste memenuhi kewajiban politiknya untuk mempromosikan dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, khususnya diskriminasi terhadap anak.

“Tema perayaan ini relevan dan mencerminkan konteks saat ini untuk mengingatkan Negara-negara Pihak, dan khususnya Negara Timor-Leste, tentang kewajibannya untuk memastikan semua upaya yang mungkin untuk melindungi dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan untuk memungkinkan anak-anak mengembangkan dan mengeksplorasi potensialitas mereka, ”kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Selain itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Anak meminta orang tua untuk menjaga anak-anak.

"Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan khusus dari orang tua serta Negara, karena anak-anak memiliki hak untuk berkembang sepenuhnya, untuk hidup di

lingkungan keluarga yang bahagia, tenang dan penuh kedamaian," kata Eugénio João Amado de M. Soares , Penjabat Sementara Komisioner Komisi Nasional Hak Anak.

Tahun ini Negara sedang merayakan hari penting ini melalui dua tahap. Tahap pertama akan melibatkan perayaan di tingkat nasional dengan tiga kegiatan, yaitu: mengatur satu hari untuk menyusun rekomendasi untuk anak-anak dan remaja tentang lingkungan yang damai, kedamaian di sekolah, keluarga dan masyarakat. Selain itu akan ada konser musik dan jalan damai, dan peluncuran pemikiran transformasional untuk mengakhiri kekerasan di tingkat rumah tangga. Tahap kedua akan dirayakan di tingkat kotamadya, terkonsentrasi di Kotamadya Manatuto, dengan kegiatan seperti seminar nasional yang diselenggarakan pada 29 November 2018 dengan topik utama yang berfokus pada lingkungan yang perdamaian, keamanan di sekolah, keluarga dan masyarakat.

Di Timor-Leste, anak-anak dihadapkan pada semua jenis kekerasan yang tidak sesuai dengan usia dan kapasitas mereka, dan khususnya bertentangan dengan hak-hak mereka sebagai anak-anak yang dijamin dalam Konvensi Hak-hak Anak. Misalnya, banyak anak yang belum bebas dari kekerasan, dan banyak yang harus bekerja untuk membantu keluarga mereka; dengan menjual barang di sisi jalan, di jalan setapak, di pasar dan mencuci mobil di pingiran jalan.

Berdasarkan pengamatan JSMP di pengadilan, banyak anak-anak menjadi korban kejahatan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual termasuk inses yang melibatkan anggota keluarga yang seharusnya melindungi dan menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak. Bahkan ada beberapa kasus pelecehan seksual yang melibatkan pendidik sendiri, meskipun jumlahnya mungkin kecil. Selain itu di kegiatan belajar mengajar di sekolah, guru masih menggunakan pendekatan fisik untuk memperkenalkan disiplin kepada siswa.

Untuk memastikan bahwa anak-anak bebas dari kekerasan jenis ini, Pemerintah, masyarakat, pendidik dan keluarga, dan orang tua khususnya, perlu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Negara perlu mengembangkan politik dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks Timor-Leste. Ini termasuk mengidentifikasi kevakuman legislatif seperti UU Perlindungan Anak yang belum diberlakukan dari mulai dair pemerintahan pertama ke pemerintahan saat ini.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu dari kewajiban Negara Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (1) Konvensi Hak-Hak Konvensi Anak

yang menyatakan bahwa “*Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau pelecehan, penelantaran atau kelalain, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual, sementara dalam pengasuhan orang tua, wali sah atau orang lain yang memiliki kepedulian terhadap anak*”.

Dari Januari 2015 hingga Oktober 2018 JSMP memantau 292 kasus yang melibatkan anak-anak.

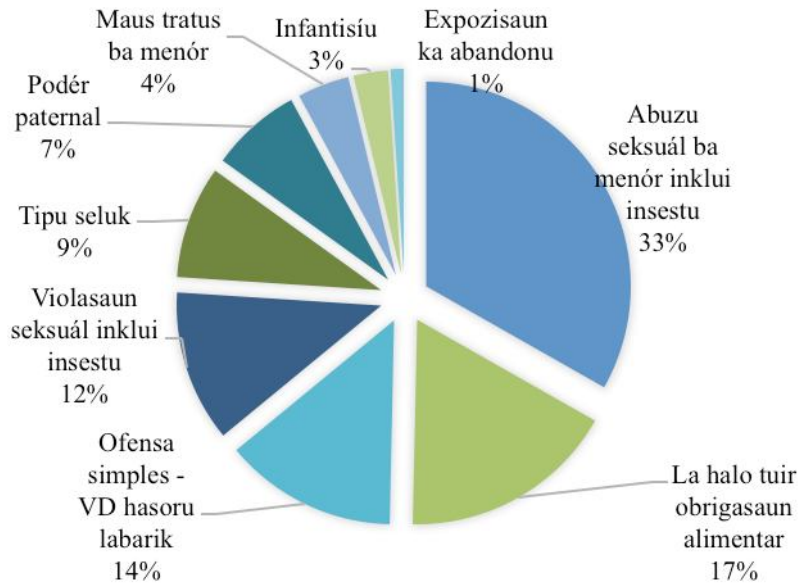
**Tabel berikut menunjukkan jenis-jenis kasus yang melibatkan anak-anak yang dipantau oleh JSMP:**

Tahun	2015	2016	2017	2018 (Okt)
Kasus yang melibatkan anak	80	91	55	66

Sebagian besar kasus ini adalah pelecehan seksual termasuk inses yang melibatkan korban berusia di bawah 14 tahun (33%), serta kejahatan tidak memberikan kewajiban penafkahan (17%), penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (14%), pemerkosaan termasuk inses yang melibatkan korban berusia 14 tahun ke atas (12%), kasus hak atas pengasuhan (7%), penganiayaan/perlakuan buruk terhadap anak di bawah umur (4%), pembunuhan bayi (3%) dan pengabaian atau pembiaran (1%). Sementara itu, 9% melibatkan jenis kasus lain.

Kasus-kasus ini hanya mewakili kasus-kasus yang mencapai pengadilan dan dimonitor oleh JSMP. JSMP percaya bahwa banyak anak mengalami masalah seperti ini tetapi kasusnya tidak diungkap dan dibawa ke pengadilan karena berbagai alasan.

**Statistik tentang kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang dipantau oleh JSMP antara Januari 2015 - Oktober 2018:**



Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa anak-anak terus berada dalam situasi yang rentan dan masih tidak aman. Oleh karena itu, sebagaimana digarisbawahi, anak-anak membutuhkan perlindungan penuh dari semua entitas melalui undang-undang khusus untuk anak-anak. Undang-undang ini akan menjamin bahwa anak-anak akan bebas dari kekerasan dan dapat menikmati hak-hak mereka dan ketika mereka bermasalah dengan hukum, mereka akan dilindungi. Undang-undang khusus dengan jaminan dapat melindungi mereka di semua proses yang melibatkan anak-anak di pengadilan dan selama intervensi terkait lainnya.

Pada tahun 2017, Departemen Solidaritas Sosial (MSS) mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada Parlemen Nasional tetapi sekali lagi tidak dibahas karena anggota parlemen tidak memiliki cukup waktu.

Rancangan undang-undang ini mengusulkan\* kerangka hukum tentang perawatan dan perlindungan untuk anak-anak dan oleh karena itu pada bulan November 2017, JSMP mengajukan usulan kepada Parlemen Nasional yang berisi analisis rancangan undang-undang tentang Perlindungan Anak dan menganggap bahwa beberapa ketentuan terlalu umum dan ambigu. Dalam usulannya, JSMP meminta pertimbangan dan perhatian dari Departemen Solidaritas Sosial dan anggota Parlemen Nasional sebelum menyetujui RUU ini.

\* Usulan JSMP mengenai Rancangan Undang Undang Perlindungan Anak tersebut dapat dilihat di: <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Analiza-ba-Esbosu-Lei-Protosaun-Labarik-MSS-2016.pdf>

Pejabat Komisioner Sementara Komisi Hak Anak, Eugénio João Amado de M. Soares, dalam sambutan terakhirnya menyatakan bahwa peringatan Hari Internasional untuk Konvensi Hak Anak mengatakan bahwa diharapkan dalam peringatan ini dapat mengurangi angka kematian ibu, mengurangi kekurangan gizi anak dan mengakhiri semua kekerasan terhadap anak-anak di rumah, komunitas dan sekolah

JSMP juga mendesak badan-badan Negara, terutama Pemerintah, untuk terus memprioritaskan pengembangan anak-anak melalui penyediaan perlindungan khusus seperti memastikan bahwa anak-anak tidak dikenakan diskriminasi, kekerasan dan pelecehan seksual, karena anak-anak adalah masa depan bangsa.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
E-mail: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)  
Telepon: 3323883

Eugénio João Amado de M. Soares  
Komisaris Pelaksana Komisi Hak Anak  
[E -mail: eugenio.soares@mss.gov.tl](mailto:eugenio.soares@mss.gov.tl)  
Telepon: +67077291162